



**PEMERINTAH  
KABUPATEN  
KAPUAS HULU**

# 2024



# RENCANA AKSI

**DINAS SOSIAL,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, telah dapat disusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2021-2026 .

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.



Putussibau, Januari 2024  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**MARTHA BANANG, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651123 199203 2 006

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud & Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II RENCANA AKSI</b> .....	4
2.1. Rencana Strategis.....	4
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	9
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) .....	11
2.4. Rencana Aksi.....	20
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kewajiban untuk melaksanakan komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi .

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus



saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;

Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menuju terwujudnya *good governance* dan sebagai wujud

transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

### **1.3. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan laporan rencana aksi capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan      Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

Bab II Rencana Aksi      Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi.

Bab III Penutup      Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.

## **BAB II**

### **RENCANA AKSI**

#### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 agar dapat menyelaraskan arah dan kebijakan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- A. Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:
1. Sumber Daya Aparatur yang jumlah dan kualitas aparatur relatif terbatas, dan belum tersedia tenaga yang profesional seperti pekerja sosial dan psikolog;
  2. Dukungan sarana dan prasarana kerja masih terbatas;
  3. Dukungan penganggaran masih terbatas;
  4. Belum optimalnya tingkat pengetahuan/pemahaman aparatur sehingga mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

B. Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi;
2. Belum adanya pemahaman yang sama terkait Pengarusutamaan Gender;
3. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan Hak Anak diberbagai bidang pembangunan;
4. Belum diadakannya materi dan pelaksanaan KIE tentang keselarasan dan keadilan gender;
5. Belum optimalnya pemahaman peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
6. Belum terlatihnya SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
7. Belum semua mengerti tentang sistem pencatatan dan pelaporan KDRT;
8. Belum pahamnya organisasi perempuan tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender;

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 – 2026 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun



2021 – 2026 .

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu bertanggungjawab terhadap misi ke 2 yaitu : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi dan Misi ke 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu sampai 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan pembangunan antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan uraian diatas, maka Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

**“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL”**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan.

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran perangkat daerah dalam rangka mencapai tujuan adalah sebagai

berikut :

1. **Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;**
2. **Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS;**
3. **Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.**

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu disajikan pada Tabel berikut :

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
<b>“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”</b>	Misi Ke-2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS; Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.
	Misi Ke-4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

**Rencana Strategis**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Kapuas Hulu**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
“Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah, dan Terampil”	Misi Ke-2: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS;	Persentase pelayanan dan jaminan kesejahteraan social	80%	80	80	80	95
			Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak.	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang terselesaikan	72	74	76	78	80
	Misi Ke-4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	B	B	B	B	A

## 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis



dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026**

NO	Sasaran		INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD	Sasaran Renstra OPD			
1	Meningkatnya penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan	Penilaian LHE (Laporan Hasil Evaluasi) oleh Tim APIP

2	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Sosial ----- x 100% Populasi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kapuas Hulu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Bidang Sosial
		Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terselesaikan	Jumlah Kasus Terselesaikan -----x100% Jumlah Kasus Keseluruhan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan

demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan. Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B
<b>2</b>	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	85%
<b>3</b>	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%



**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B			2.787.935.355
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		2.034.325.895
					<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.273.500</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.773.500
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.280.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.780.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.780.000
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.780.000
					Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.880.000
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.215.089.395</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.001.345.395
					Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25.560.000
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	178.182.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.776.000

				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.313.000
				Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan Pemeriksaan	1.600.000
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3.313.000
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.823.000</b>
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.823.000
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174.347.000</b>
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	2.060.000
				Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	1.700.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.817.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.200.000
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	123.170.000
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	8.400.000
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>350.518.864</b>
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.700.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.443.080
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	3.410.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	271.965.784
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>17.883.596</b>
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.624.000

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.259.596
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	80%			453.446.200
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		201.294.000
					<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	201.294.000
					Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	168.932.000
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	32.362.000
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		4.200.700
					<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>	4.200.700
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	4.200.700
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		93.539.000
					<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	93.539.000
					Penyediaan Permakanan	1.320.000

					Penyediaan Alat Bantu	11.663.000
					Pemberian Layanan Rujukan	80.556.000
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>54.487.000</b>
					<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>54.487.000</b>
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	37.961.000
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	16.526.000
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>68.443.500</b>
					<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>21.543.500</b>
					Penyediaan Makanan	21.543.500
					<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>46.900.000</b>
					Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	46.900.000
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>31.482.000</b>
					<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>31.482.000</b>
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.482.000
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	<b>Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan</b>	<b>74%</b>			<b>119.839.000</b>
				<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>		<b>20.514.000</b>



					<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	<b>10.387.000</b> 10.387.000
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>10.127.000</b> 10.127.000
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>		<b>12.792.000</b>
					<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>12.792.000</b> 12.792.000
				<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>		<b>72.133.000</b>
					<b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>24.404.000</b> 24.404.000
					<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>47.729.000</b>

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.925.000
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.804.000
			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>		<b>14.400.000</b>
				<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.400.000</b>
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.400.000
				<b>JUMLAH</b>	<b>3.361.220.555</b>

### 2.3. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	Meningkatnya Implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	0	0	B	0
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	55%	10%	10%	10%
3	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	10%	19%	25%	20%

**Lampiran I**  
**Rencana Aksi Capaian Kinerja**  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**Tahun 2024**

**I. SEKRETARIAT**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN/SUB KEGIATAN							SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN					
						I	II	III	IV				I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DSPPA	Predikat SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Predikat SAKIP	B	0	0	B	0								DAU	Sekretariat
				1. Cakupan Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	30%	25%	25%	20%	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja						DAU	Sekretariat
										1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	4	1	0	0	DAU	Sekretariat
										2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	0	0	0	DAU	Sekretariat
										3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
										4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	1	0	0	0	DAU	Sekretariat



										5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA6SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	0	0	1	0	DAU	Sekretariat							
										6	Koordinasidan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	0	0	0	1	DAU	Sekretariat							
										7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	1	1	1	1	DAU	Sekretariat							
									2. Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	25%	25%	25%	25%			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan DSPPA						DAU	Sekretariat
										1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	3	5	3	3	DAU	Sekretariat							
										2	Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	1	1	1	1	DAU	Sekretariat							
										3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	1	1	1	1	DAU	Sekretariat							
										4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1	0	0	0	1	DAU	Sekretariat							
										5	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	0	0	0	1	DAU	Sekretariat							

									Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
								6	Pengelolaan dan Penyediaan bahan tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	0	0	0	1	DAU	Sekretariat
								7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5	1	1	1	1	DAU	Sekretariat
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian						DAU	Sekretariat
								1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum						DAU	Sekretariat
								1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
								2	Penyediaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
								3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
								4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat

										5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	0	1	0	1	DAU	Sekretariat
										6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2	3	3	3	3	DAU	Sekretariat
										7	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis PD SKPD	1	0	1	0	1	DAU	Sekretariat
				5. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	25%	25%	25%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						DAU	Sekretariat
										1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	0	1	0	1	DAU	Sekretariat
										2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	3	3	3	3	DAU	Sekretariat
										3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	0	1	0	1	DAU	Sekretariat
										4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat

				6. Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						DAU	Sekretariat
										1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat
										2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1	0	1	0	0	DAU	Sekretariat

II. BIDANG SOSIAL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN/SUB KEGIATAN								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN						
						I	II	III	IV				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Meningkatnya Penanganan dan Pelayanan PMKS	% Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Penanganan dan Pelayanan PMKS	Persentase Pelayanan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	80%	20%	20%	20%	20%								DAU	Bidang Sosial	
			1.Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang di Fasilitasi	100%	20%	30%	40%	30%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi								



[illegible]

										1	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	6	1	2	2	1	DAU	Bidang Sosial
										2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	6	0	0	6	0	DAU	Bidang Sosial
										3	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	3	4	4	4	DAU	Bidang Sosial
			4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	100%	25%	25%	25%	25%		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin						DAU	Bidang Sosial
										1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	22250	5562	5562	5562	5564	DAU	Bidang Sosial
										2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	9001	2250	2250	2250	2251	DAU	Bidang Sosial
			5.Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	100%	25%	25%	25%	25%		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani						DAU	Bidang Sosial
										1	Penyediaan Makann	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	10	2	3	3	2	DAU	Bidang Sosial

											Kewenangan Kabupaten/Kota							
										Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen Korban Bencana Alam dan Sosial yang ditangani						DAU	Bidang Sosial
										1 Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	34	34	0	0	0	DAU	Bidang Sosial
			6.Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelola Taman Makam Pahlawan	100%	25%	25%	25%	25%	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	jumlah Taman Makam Pahlawan yang dilakukan pemeliharaan						DAU	Bidang Sosial
										1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Makamyang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman MakamPahlawan Kabupaten/Kota	2	2	0	0	0	DAU	Bidang Sosial

III. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM							KEGIATAN/SUB KEGIATAN								SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
			URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN				URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET 2024	TARGET TRIWULAN						
						I	II	III	IV				I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Meningkatnya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	% Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	Perlindungan Kekersan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang terselesaikan	74%	18%	18%	18%	20%								DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	2,51%	0%	2,51%	0%	0%	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen sosialisasi PUG						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

							1	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	27	0	27	0	0	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang difasilitasi	1	1	0	0	0	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	100%	30%	30%	30%	10%		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Hak Anak						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	0	0	0	1	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	200	0	0	0	200		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemenuhan Hak Anak						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



									1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	0	0	0	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota- PATBM	1	0	0	1	0	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - Sosialisasi Forum Anak Daerah	1	0	0	0	1	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4. Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Anak Korban Kekerasan yang tertangani	50%	25%	0	25%	0	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan						DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota	2	1	0	1	0	DAU	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### **BAB III**

## **PENUTUP**

Dokumen Rencana Aksi Kinerja merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.